

PERAN KELOMPOK KEPENTINGAN PENGURUS BESAR PGRI DALAM POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Anggun Sartika¹, Muhammad Sirozi²

¹²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat e-mail : ¹annggunsartika10@gmail.com, ²msirozi@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The politicization of education is a reflection of the complexity of the relationship between political power and a country's education system. This phenomenon is a major concern in discussions about educational development in various parts of the world. Education, which should be a means of improving the quality of life of individuals and society, is often involved in complex political contexts, experiencing various forms of control, manipulation and intervention by the government, political parties, other interests. This research uses a library research approach and is qualitative in nature. which utilizes published writings, such as books, journals and articles, which are then processed properly to discover new knowledge so that it is useful for students and the general public. The role of interest groups in Indonesian national education politics is to promote a culture of critical thinking and present novelty based science in the development process. Being critical of the political aspirations of the PGRI executive board is an aspect that needs to be considered in the context of the importance of interests in Indonesian national education politics. Indonesia's national education policy is to prioritize a culture of critical thinking and present knowledge-based novelty in the development process. PGRI also functions to fight for alternative general policies to become political policies. The criticism mentioned regarding the large political aspirations of the PGRI management is not available in the search results. However, it can be explained that PGRI has several obstacles, such as limited research which shows low management transparency and lack of member participation in growing the organization. To improve the situation.

Keywords: *Aspirations, Politics, PGRI*

ABSTRAK

Politisasi pendidikan merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan sistem pendidikan suatu negara. Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang pembangunan pendidikan di berbagai belahan dunia. Pendidikan, seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, sering terlibat dalam konteks politik yang kompleks, mengalami berbagai bentuk kontrol, manipulasi dan intervensi oleh pemerintah, partai politik, kepentinganlainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi pelajar dan masyarakat umum. Peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. Kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI merupakan

suatu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks pentingnya kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan PGRI juga berfungsi untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi kebijakan politik. Kritik yang disebutkan terkait aspirasi politik pengurus PGRI yang besar tidak tersedia dalam hasil pencarian. Namun dapat dijelaskan bahwa PGRI mempunyai beberapa kendala, seperti keterbatasan penelitian yang menunjukkan rendahnya transparansi manajemen pengelolaan dan kurangnya partisipasi anggota dalam membesarkan organisasi. Untuk memperbaiki situasi tersebut.

Kata Kunci: Aspirasi, Politik, PGRI

A. Pendahuluan

Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit/ kesatuan, kesatuan tersebut bisa diartikan masyarakat / negara. *Sedangkan Gabriel A. Almond* menyatakan bahwa sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Dalam masyarakat modern, otorita/kekuasaan yang sah tadi memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekuasaan dan paksaan berbentuk negara. Teori struktural-fungsional yang dikembangkan oleh *Gabriel Almond* berasumsi bahwa setiap sistem politik harus terdapat fungsi-fungsi demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri. (Almond, Powell, Strom, & Dalton, 1974)

Sistem politik dilaksanakan melalui struktur politik/ lembaga politik. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur politik dan infra-struktur politik. Supra- struktur politik merupakan lembaga politik yang berfungsi menjalankan mesin politik secara formal / lembaga-lembaga resmi pemerintahan negara.

Politisasi pendidikan merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan sistem pendidikan dalam suatu negara. Fenomena ini telah menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang pembangunan pendidikan di berbagai belahan dunia (Sofyan & Rianty, 2023). Pendidikan, yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, sering kali terjatuh dalam konteks politik yang kompleks, mengalami berbagai bentuk kontrol, manipulasi dan intervensi oleh

pemerintah, partai politik, dan kepentinganlainnya. (Sudarmono, Hasibuan, & Us, 2020)

Dalam banyak kasus, politisasi pendidikan dimulai dengan upaya penguasa untuk mengendalikan isi dan arah pendidikan sesuai dengan kepentingan politik mereka. Hal ini dapat tercermin dalam penetapan kurikulum yang mencerminkan pandangan ideologis penguasa (Sutrisman, 2019), penyensoran terhadap materi yang dianggap mengancam stabilitas politik, atau manipulasi informasi untuk menciptakan narasi politik yang mendukung agenda tertentu. Sebagai contoh, di beberapa negara otoriter, pemerintah cenderung menggunakan pendidikan untuk memperkuat kekuasaan mereka dengan mengontrol apa yang diajarkan kepada generasi muda.(Marbawi, 2018)

Politisasi pendidikan juga dapat terjadi melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta atau agama yang mendapat dukungan finansial atau politik dari pemerintah atau kelompok politik tertentu. Hal ini dapat mengarah pada polarisasi ideologis di antara lembaga-lembaga pendidikan, serta menyebabkan distorsi dalam

penyampaian pengetahuan dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi fokus utama Pendidikan.(Nurdin & Hartati, 2019)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum (Nazir, Rao, Wu, & Sun, 2020). Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi penulisan, bermacam-macam informasi ide yang dieksplorasi, konseptualisasi, pemeriksaan dan penyelesaian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.(Tersiana, 2018).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Kelompok Kepentingan dalam Politik Pendidikan Nasional Indonesia merupakan suatu konsep

yang mengacu pada peranan kelompok atau partai politik dalam mengarahkan dan mengatur pendidikan nasional di Indonesia. Konsep ini terkait dengan peranan kelompok atau partai politik dalam mengatur dan mengarahkan pendidikan nasional di Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada pendidikan fisik, tapi juga pendidikan moral dan ideologi. (Sutrisman, 2019)

Tinjauan kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI (Persatuan Gerakan Rakyat Indonesia) adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. PGRI adalah sebuah kelompok politik yang memiliki visi dan ideologi yang berbeda dari pemerintah, dan peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. (Suryana, Awali, Huda, & Kurnia Aditirta, 2022)

Kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI merupakan suatu konteks yang menarik untuk diperhatikan dalam konteks peranan

kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. PGRI adalah sebuah kelompok politik yang memiliki visi dan ideologi yang berbeda dari pemerintah, dan peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan.

Kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI juga merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. PGRI adalah sebuah kelompok politik yang memiliki visi dan ideologi yang berbeda dari pemerintah, dan peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. (Suryana et al., 2022)

Tinjauan kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI juga merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. PGRI

adalah sebuah kelompok politik yang memiliki visi dan ideologi yang berbeda dari pemerintah, dan peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. (Mukhtar, n.d.)

Peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. Kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. PGRI adalah sebuah kelompok politik yang memiliki visi dan ideologi yang berbeda dari pemerintah, dan peranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. (Nashihin, 2019)

Tinjauan mengenai aspirasi politik pengurus Besar PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) terkait penekanan, transparansi, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan guru di Indonesia. (Mukhtar, n.d.)

1. Peranan PGRI: PGRI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan guru, termasuk mengawal kebijakan pemerintah, mempertahankan dan meningkatkan tingkat pendidikan, pengajaran, dan kesejahteraan guru, serta mengelola hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
2. Kritik terhadap PGRI: Beberapa kritik yang dianggap berlaku terhadap PGRI antara lain:
 - a. Kekurangan transparansi: Masih terdapat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan PGRI, yang membutuhkan pelaporan auditor kepada public
 - b. Kekurangan konsistensi: PGRI telah meningkatkan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan guru, tetapi masih ada tantangan dalam lingkup

- global, nasional, dan organisasional
- c. Kekurangan aktifitas: Beberapa anggota PGRI hanya beriklan kepada seniors tanpa motivasi, yang mengurangi produktivitas organisasi
3. Saran: Untuk memperbaiki situasi, PGRI perlu melakukan pelaporan auditor kepada publik, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan, dan membangun lebih banyak sinergi dan komunikasi politik dengan lembaga-lembaga pengambil kebijakan, seperti Pemerintah, DPRD, DPR, DPD, dan partai politik
 4. Konflik dalam sejarah: PGRI telah mengalami konflik dalam sejarah, seperti kongres X di Jakarta, dimana pengurus yang berafiliasi politik paham komunis dan dekat dengan kekuasaan Presiden Soekarno saat itu, mendeklarasikan diri membentuk PGRI tandingan di luar kepemimpinan PGRI Kongres yang dipimpin oleh M.E. Subiyadinata
 5. Pengurusan PGRI: Pengurus PGRI kabupaten/kota menyetorkan iuran untuk pengurus besar bersama dengan iuran untuk pengurus PGRI Provinsi kepada pengurus, dan pengurus ranting, pengurus cabang, dan pengurus daerah
 6. Kemajuan PGRI: PGRI telah meraih kemajuan, seperti menjadi unit untuk menjadi wadah pemersatu guru yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan, dan memiliki anggota sekitar 3 juta guru dan tenaga kependidikan
 7. Hari Guru Nasional: Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional
 8. Tantangan Global: PGRI mengalami tantangan global, termasuk perubahan yang berlangsung cepat terutama dalam ilmu pengetahuan dan lingkungan yang sedang berubah secara global, memerlukan pola kerja dalam bentuk kerja tim, sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
 9. Perjuangan PGRI: PGRI tetap setia dalam pengabdianya sebagai organisasi profesi yang

bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan.

Kritik terhadap aspirasi politik pengurus Besar PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dapat mempengaruhi dampaknya terhadap organisasi ini. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain:(Anjani & Rahmadi, 2022)

1. Kurangnya Transparansi: Kritik terhadap kekurangan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan PGRI mungkin mengurangi reputasi organisasi ini. PGRI perlu melakukan pelaporan auditor kepada publik untuk memperbaiki transparansi dan mempercayai lebih banyak masyarakat.
2. Kurangnya Konsistensi: Kritik terhadap kekurangan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan guru di Indonesia mungkin menghalangi PGRI dalam mencapai tujuan utama organisasi ini. PGRI perlu membangun lebih banyak sinergi dan komunikasi politik dengan lembaga-lembaga pengambil kebijakan, seperti Pemerintah, DPRD, DPR, DPD, dan partai politik, agar misi perjuangannya dapat tercapai.
3. Kurangnya Partisipasi Anggota: Kritik terhadap kekurangan partisipasi anggota dalam membesarkan organisasi PGRI mungkin menghalangi PGRI dalam mencapai tujuan utama organisasi ini. PGRI perlu memperbaiki transparansi manajemen pengelolaan dan membangun lebih banyak sinergi dan komunikasi politik dengan lembaga-lembaga pengambil kebijakan, agar anggota PGRI lebih terpartisipasi dalam organisasi ini.
4. Kurangnya Produktivitas: Kritik terhadap kekurangan aktifitas dan kehilangan motivasi dalam organisasi PGRI mungkin menghalangi PGRI dalam mencapai tujuan utama organisasi ini. PGRI perlu memperbaiki produktivitas organisasi dengan menggalakkan lebih banyak partisipasi dan motivasi anggota PGRI.
5. Konflik Politik: Kritik terhadap konflik politik dalam sejarah PGRI mungkin menyebabkan perubahan yang signifikan dalam organisasi ini. PGRI perlu mengemukakan kekuatan organisasi yang terletak pada anggota, serta memperbaiki

- konsistensi dan transparansi dalam organisasi ini.
6. Kekurangan Pendidikan Politik: Kritik terhadap kekurangan pendidikan politik rakyat mungkin menghalangi masyarakat dalam menjadi warga negara yang sadar hak dan berbangsa dan bernegara. PGRI perlu mengembangkan program pendidikan politik rakyat untuk membantu masyarakat dalam memahami hak dan berbangsa dan bernegara.
 7. Kekurangan Fungsi Partai Politik: Kritik terhadap kekurangan fungsi partai politik mungkin menghalangi PGRI dalam mencapai tujuan utama organisasi ini. PGRI perlu memperbaiki fungsi partai politik dalam organisasi ini, seperti menjadi sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa Indonesia, dan menjadi sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
 8. Kekurangan Komunikasi Politik: Kritik terhadap kekurangan komunikasi politik dengan lembaga-lembaga pengambil kebijakan mungkin menghalangi PGRI dalam mencapai tujuan utama organisasi ini. PGRI perlu membangun lebih banyak sinergi dan komunikasi politik dengan lembaga-lembaga pengambil kebijakan, seperti Pemerintah, DPRD, DPR, DPD, dan partai politik.
 9. Kekurangan Pelaporan Auditor: Kritik terhadap kekurangan pelaporan auditor kepada publik mungkin menghalangi PGRI dalam mencapai tujuan utama organisasi ini. PGRI perlu melakukan pelaporan auditor kepada publik untuk memperbaiki transparansi dan mempercayai lebih banyak masyarakat.
 10. Kekurangan Kesejahteraan Guru: Kritik terhadap kekurangan kesejahteraan guru mungkin menghalangi PGRI dalam mencapai tujuan utama organisasi ini. PGRI perlu memperbaiki kesejahteraan guru dalam organisasi ini, seperti dengan mempertahankan dan meningkatkan tingkat pendidikan, pengajaran, dan kesejahteraan guru.
- Untuk mengatasi dampak negatif dari kritik terhadap aspirasi politik

pengurus Besar PGRI, PGRI perlu meningkatkan transparansi, konsistensi, partisipasi anggota, produktivitas, kekuatan organisasi, pendidikan politik rakyat.

D. Kesimpulan

PGRI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) adalah sebuah kelompok kepentingan yang berperan dalam mengartikulasikan kepentingan guru terhadap pemerintah. PGRI memiliki anggota yang jelas dan memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan yang jelas, dan pola komunikasi yang baik ke dalam dan ke luar organisasi.

PGRI juga berfungsi untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi kebijakan politik. Kritik yang disebutkan terkait aspirasi politik pengurus PGRI yang besar tidak tersedia dalam hasil pencarian. Namun, dapat dijelaskan bahwa PGRI memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan penelitian yang menunjukkan kurangnya transparansi manajemen pengelolaan dan kurangnya partisipasi anggota dalam membesarkan organisasi. Untuk memperbaiki situasi tersebut, PGRI perlu melakukan pelaporan auditor kepada publik dan memastikan adanya komunikasi politik yang efektif

dengan lembaga-lembaga pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., Powell, G. B., Strom, K., & Dalton, R. J. (1974). *Comparative politics today: a world view*. Little, Brown.
- Anjani, K. T., & Rahmadi, D. (2022). Perjuangan PGRI dalam Mensejahterakan Guru: Kontribusi PGRI Dalam Pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005. *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI*, 1(1).
- Marbawi, M. (2018). Penguatan ideologi Pancasila dalam pendidikan. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 6(2), 165–180.
- Mukhtar, M. A. (n.d.). Kiprah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam peningkatan mutu guru di Indonesia. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nashihin, H. (2019). *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi)*. CV. Pilar Nusantara.
- Nazir, A., Rao, Y., Wu, L., & Sun, L. (2020). Issues and challenges of aspect-based sentiment analysis: A comprehensive survey. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 13(2), 845–863.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.

- Sofyan, J. F., & Rianty, M. (2023). Karakteristik manajemen dan kepemimpinan transformasional sebagai penentu kreativitas karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 12(2), 448–470.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Suryana, C., Awali, A. M., Huda, M. A., & Kurnia Aditirta, M. L. (2022). Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.